

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penelitian tentang pemberdayaan KPM melalui program e-Warong di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, aktifitas pengikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang dijalankan dalam program e-Warong dibuktikan dengan adanya pengurus atau pelaksana lapangan di tiap titik e-Warong, dimana pengurus e-warong merupakan anggota KUBE-PKH. Praktik yang dilakukan dalam pemberdayaan ialah dengan cara saling berhubungan antar pihak, baik antar anggota maupun dengan pihak luar seperti bank konvensional, Bulog, suplayer, pendamping, serta KPM biasa. Mereka memiliki fungsi dan tugas-tugas tersendiri yang saling berkaitan sehingga akan memunculkan suatu sistem. Untuk membangun sebuah sistem tersebut dalam praktiknya pendamping menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan mikro, mezzo, dan makro.

Sedangkan problem kemiskinan menjadi problem global diawali sejak tahun 1947 dari pidato Truman, pada saat itu peran World Bank sangat tampak dalam modalitas donasi dan Negara penerima donasi tersebut juga dikembangkan secara seragam melalui disiplin perencanaan, dimana dalam hal ini juga terjadi standarisasi-standarisasi kemiskinan. Dan dalam wacana Agama Islam, kemiskinan juga dapat ditinjau dari kacamata *maqasid al-syariah*, dimana dalam pelaksanaan e-Warong nyatanya juga memiliki tujuan

yang sama yaitu menuju kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan e-Warong, yang didalamnya terbentuk system dari keterhubungan antar pihak inilah yang kemudian muncul relasi-relasi kuasa, kuasa disini salah satunya lahir dari latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda. Pemerintah yang mampu melakukan kuasa melalui kebijakan mampu mengatur menghubungkan beberapa lembaga negara, seperti Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Bulog, dll. Mereka (lembaga negara) yang diikutkan perannya dalam program kebijakan e-Warong ini kemudian menyesuaikan perannya sesuai fungsi lembaga masing-masing, dan dalam tataran itulah mereka melakukan kuasa pengetahuan melalui kebijakan. Sedangkan dalam rumpun bawah, relasi kuasa yang terbentuk atas dasar pengetahuan juga sangat tampak. Dimana KUBE-PKH, pendamping, suplayer, dan masyarakat umum yang memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda, mereka akan membentuk wacana pengetahuan dan akan mempraktikkan sebagaimana kemampuan yang sedang ia miliki, seorang KUBE-PKH yang berlatar belakang pesantren maka wacana yang terbentuk seolah-olah selalu bersandar pada ruang religiusitas, begitupun dengan subjek yang memiliki latar belakang pengetahuan lain. Suplayer akan melakukan praktik sebagaimana pedagang, karena wacana pengetahuan yang melatar belakangi ialah pengetahuan ekonomi, begitu pula dengan yang lain. Artinya kuasa terbentuk dari pengetahuan dan kuasa itulah yang nantinya akan membentuk pengetahuan. Selain itu, kuasa yang berjalan disini justru

menciptakan pola yang produktif bahkan mampu mewujudkan empati antar anggota masyarakat, bukan lagi kuasa yang dimaknai secara vertikal.

B. Saran

Kemiskinan memanglah salah satu issue permasalahan sosial yang tetap hangat diperbincangkan. Dari waktu ke waktu, kebijakan ke kebijakan sudah dilakukan pemerintah sebagai upaya pengentasannya akan tetapi keberadaan persoalan ini tetap ada hingga hari ini. e-Warong KUBE-PKH merupakan salah satu terobosan yang dilakan pemerintah dalam teknis pencairannya, yaitu melalui sistem perbankan. Selain itu juga terdapat praktik pemberdayaan masyarakat melalui peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Akan tetapi dalam penelitian ini telah diungkapkan bagaimana problem-problem yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini menandakan sebuah kekurangsiapan dari pelaku kebijakan. Problem-problem itu akan teratasi salah satunya dengan perbaikan sistem serta edukasi yang lebih kepada masyarakat rumpun bawah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan data serta ketidak tahuan secara pasti tentang tolak ukur penerima bantuan kepada calon keluarga penerima manfaat serta masyarakat secara umum.

